

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN GERAGAI

DESA PANDAN SEJAHTERA

Jln. Singosari SK 9. NO : 01.

Telp. 0821-8165-1665 Kode Pos 36561

Pandan Sejahtera, 30 April 2018

Nomor : 146 / 186 / PS / 2018

Sifat : Penting

Perihal : Pengantar **(Laporan terkait sengketa dan konflik lahan Transmigrasi)**

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth :

Bapak Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Di Tempat

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan Hormat,

Semoga bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari, Aamiin ya Allah.

Bapak menteri yang kami hormati, kami yang bertanda tangan di dalam surat ini adalah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan usaha yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada tahun 2001,

Dari dua hektar lahan usaha (LU) yang diberikan oleh pemerintah, baru 1 hektar yang didapatkan masyarakat , yang kemudian dibagi lagi kedalam lahan pemukiman dan lahan usaha satu, sedangkan 1 hektar lahan usaha dua (LU II) pada tahun 2005 baru dikeluarkan melalui peta yang oleh SUBDIN PKTP Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Setelah Lahan Usaha II dikeluarkan oleh pemerintah

sebagian masyarakat memang tidak langsung mengelola lahan tersebut karena belum memiliki modal untuk mengelola lahan tersebut dan lahan tersebut dijadikan lahan cadangan yang nantinya tetap akan diolah ditanami dan dirawat. Untuk bapak ketahui bahwa lahan usaha dua (LU II) yang diberikan kepada masyarakat tidak semuanya di kuasai oleh masyarakat, lahan tersebut di serobot oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta PT. Indonusa Agromulia dan sekarang masih dikuasai oleh perusahaan tersebut. Beberapa kali masyarakat mengadukan hal ini ke berbagai instansi terkait dari level pemerintah kabupaten sampai ke tingkat provinsi, akan tetapi belum menemui titik terang menuju penyelesaian sengketa lahan ini.

Pada Akhir tahun 2016 Kepala Desa Pandan Sejahtera menerima peta tata ruang baru lahan usaha II yang dikeluarkan oleh BPN Tanjung Jabung timur dan sekaligus diinformasikan bahwa sebagian sertifikat Lahan usaha II telah terbit, akan tetapi tidak semua masyarakat mendapatkan sertifikat atas lahan usaha tersebut dan luasan yang diterima juga tidak sesuai dengan luasan yang tertera pada peta tata ruang lahan usaha II (LU II) yang dikeluarkan pada tahun 2005, hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

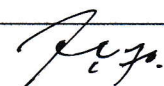
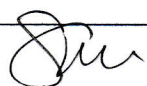
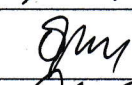
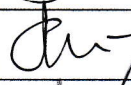
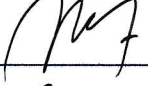
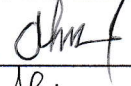




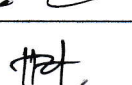
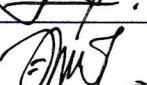

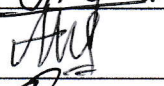
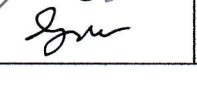



Melalui surat ini kami berharap sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.Indonusa Agromulia dapat diselesaikan, karena ketika dibenturkan dengan perusahaan yang mempunyai modal besar dan selalu memakai jasa keamanan tentunya masyarakat akan kalah dan pihak keamanan cenderung berpihak kepada perusahaan, dengan salah satu dalihnya bahwa di lahan tersebut telah diterbitkan HGU. Melalui humas perusahaan masyarakat juga pernah disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, dan tentunya upaya menempuh jalur hukum ini akan tetap kami laksanakan dengan harapan dapat mengungkap penyebab dan yang menjadi akar dari permasalahan ini.

Bapak menteri yang kami hormati, kami sangat berharap ada jalan keluar serta kebijakan yang berpihak kepada kami, masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan – lahan transmigrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk bapak ketahui pula, pihak perusahaan sampai hari ini juga masih memakai cara – cara lama dalam menyelesaikan permasalahan, beberapa pengaduan terkait permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat yang dinilai vokal dalam memperjuangkan hak nya datang dari perusahaan, beberapa kali pula masyarakat di panggil pihak kepolisian untuk menjelaskan duduk perkara dan permasalahan yang mereka hadapi atas laporan yang dibuat oleh perusahaan tentunya. Masyarakat yang merasa ini adalah hak mereka tentunya selalu hadir dan menjelaskan apa yang menjadi pokok persoalan tersebut.

Langkah dan upaya yang kami tempuh untuk mendapatkan lahan yang telah diserobot oleh perusahaan sudah cukup maksimal, dan setelah berkomunikasi dengan pihak yang dapat membantu kami dalam proses—proses terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi, kami menuliskan surat ini kepada bapak menteri dengan tembusan kepada berbagai pihak yang kami rasa juga dapat membantu dan minimal tahu bahwa Lahan Usaha Transmigran di salah satu Desa yang ada di Republik ini sedang bermasalah dan diserobot oleh Perusahaan kelapa sawit.

Demikianlah surat ini kami buat dan besar harapan kami bapak menteri dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi.

Hormat kami, masyarakat yang lahannya diserobot oleh perusahaan

NAMA	PARAF	NAMA	PARAF
1. Juprianto		10. Sugianto	
2. Ngairin		11. Imam Subakri	
3. Suwarni		12. Sumandar	
4. Misdi		13. Wiyono	
5. Warsih		14. Purwadi	
6. Emput		15. Joko Sulistio	
7. Untung Karyanto		16. Adi Joko Susanto	
8. Kaharudin		17. Ajuar Anas	
9. Suwarno		18. Nana Sutisna	

Mengetahui

Kepala Desa Pandan Sejahtera



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Jakarta
2. Presiden Republik Indonesia , di Jakarta
3. Kepala Kantor Staff Presiden Republik Indonesia, di Jakarta
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia , di Jakarta
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, di Jakarta
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta
7. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta
8. Menteri Sosial Republik Indonesia, di Jakarta
9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) , di Jakarta
10. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), di Jakarta
11. Direktur Utama PT. Indonusa Agromulia, di Jakarta
12. Ketua DPRD Provinsi Jambi, di Jambi
13. Gubernur Provinsi Jambi, di Jambi
14. Kepala Kepolisian Daerah Jambi, di Jambi
15. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, di Jambi
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi , di Jambi
17. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, di Jambi
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, di Jambi
19. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, di Jambi
20. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Jambi (WALHI Jambi), di Jambi
21. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Sabak
22. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Sabak
23. Kepala kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Sabak
24. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Sabak
25. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Sabak
26. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sabak
27. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, di Sabak
28. Camat Kecamatan Geragai, di Kelurahan Pandan Jaya
29. Kepala Kepolisian sektor Geragai , di Kelurahan Pandan Jaya
30. ARSIP